

(Original Article)

Strategi Kolaboratif Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Blekok di Desa Klatakan Kabupaten Situbondo

Bagas Ubay Rosadiyanto^{1*}, Ach Ilyasi², Khusnul Khotimah³^{1,2,3}Departemen Administrasi Publik, Universitas Islam Jember, Indonesia*Correspondence: bagasubay29@gmail.com

Abstract

Blekok Tourist Destination in Klatakan Village, Situbondo Regency, is a themed tourism area focused on mangrove conservation and water bird preservation, serving as a major attraction that draws visitors through its natural beauty, culture, history, or human-made facilities that provide satisfaction and joy. Tourism destinations are not only evaluated by their beauty but also by the completeness of facilities, services, attractions, and ease of access. These activities encompass various functions and dimensions, including entertainment, education, culture, and economy. In line with the technological era and tourism development innovations, numerous challenges arise, such as declining visitor numbers, damaged tourism facilities, environmental degradation, and limited human resource knowledge. The objective of this research is to describe and identify the local government's strategies in developing the Kampung Blekok Tourist Destination in Klatakan Village, Situbondo Regency. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing primary data from in-depth interviews and secondary data. Therefore, collaborative governance strategies are essential, involving the local government, community, private sector, and local groups to achieve successful tourism destination development in Situbondo Regency, ensuring long-term growth as a primary tourism site. Effective strategies will highlight the strategic tourism potential in supporting environmental conservation while driving economic and social development in Situbondo Regency, aligning with national and regional policies for sustainable tourism sector growth.

Keywords

collaborative governance, government strategy, tourist destination

Received: 9 January 2026; Revised: 11 March 2026; Accepted: 28 April 2026

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang semakin mendapatkan perhatian, baik di negara maju maupun berkembang, karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Destinasi wisata dimaknai sebagai lokasi atau objek yang dikunjungi individu maupun kelompok untuk memperoleh pengalaman melalui keindahan alam, kekayaan budaya, aktivitas rekreasi, hingga kepentingan bisnis. Sementara itu, individu atau kelompok yang melakukan perjalanan tersebut disebut sebagai wisatawan. Menurut Ananto (2018), wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga mendorong seseorang untuk berkunjung, baik berupa keindahan alam, budaya, sejarah, maupun fasilitas buatan manusia yang mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, ditandai dengan kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta keragaman seni dan budaya. Salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut adalah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2017, masyarakat diperkenalkan dengan destinasi wisata Kampung Blekok yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit. Kawasan ini merupakan destinasi wisata berbasis konservasi mangrove yang menawarkan

panorama pantai, hamparan hutan mangrove, serta keanekaragaman burung air, khususnya burung blekok (*Ardeola speciosa*).

Kampung Blekok memiliki luas sekitar 29,6 hektar dengan komposisi sekitar 60% berupa hutan mangrove, menjadikannya sebagai destinasi ekowisata yang edukatif dan ramah lingkungan. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi ribuan burung blekok dan berbagai jenis burung air lainnya. Dalam pengembangannya, keterlibatan masyarakat lokal menjadi elemen penting sehingga tercipta sinergi antara aspek konservasi dan pemberdayaan ekonomi. Dengan jumlah sekitar 12.600 pohon mangrove, kawasan ini berhasil meraih penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 Iqbal, (2023), yang menegaskan potensinya sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, destinasi ini tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga pengalaman edukatif melalui kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove, serta pengamatan burung di habitat aslinya. Selain itu, wisatawan juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.

Secara geografis dan kebijakan, Kabupaten Situbondo berada dalam kawasan strategis pariwisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS) Tahun 2010–2025, yang menetapkan kawasan Ijen–Baluran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2019 tentang RIPPARKAB Tahun 2019–2034, terdapat tiga Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), yaitu DPK Besuki–Rengganis, DPK Panarukan–Ringgit, serta DPK Asembagus–Baluran. Data menunjukkan terdapat 114 potensi wisata dan 20 destinasi yang telah dikembangkan sebagai daya tarik wisata (DTW), meliputi wisata alam, buatan, sejarah, serta religi dan budaya.

Dalam perspektif konseptual, kualitas destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh kelengkapan fasilitas, kualitas pelayanan, serta aksesibilitas. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan dimensi multidisipliner yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pariwisata memiliki fungsi strategis dalam pembangunan nasional. Sedangkan individu atau kelompok yang melakukan perjalanan dengan tujuan wisata, seperti berkreasi, berbisnis, atau memenuhi kebutuhan khusus lainnya, disebut wisatawan (Dwijayanty, et al 2021). Wisata merupakan tempat atau hal yang menjadi daya tarik sehingga banyak orang ingin berkunjung, bisa berupa keindahan alam, budaya, sejarah, atau fasilitas yang dibuat oleh manusia yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi pengunjung (Ananto, et al 2018). Kualitas sebuah wisata tidak hanya dilihat dari keindahannya saja, tetapi juga dari kelengkapan fasilitas, pelayanan, dan kemudahan akses ke tempat tersebut. Kegiatan tersebut memiliki berbagai fungsi dan dimensi, melibatkan aspek hiburan, pembelajaran, budaya, dan ekonomi sekaligus. Objek wisata sendiri meliputi beberapa aspek yaitu objek wisata alam, budaya/religi, sejarah maupun buatan. Kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu di luar tempat tinggal biasa untuk menikmati berbagai daya tarik dan pengalaman baru.

Dengan menjaga kelestarian destinasi wisata, Indonesia bisa mempertahankan keindahan alam dan budaya yang unik, memastikan destinasi wisata dapat terus berkembang, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pelestarian ini juga membantu menjaga ekosistem dan keragaman hayati yang menjadi daya tarik utama wisatawan, sehingga Indonesia bisa bersaing sebagai tujuan wisata dunia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Destinasi wisata bukan hanya sumber penghasilan besar, tetapi juga berperan penting dalam

melindungi lingkungan dan budaya, memberdayakan masyarakat lokal, serta mengembangkan daerah, yang semuanya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya wisatawan lokal dan asing, penelitian tentang pariwisata memberikan solusi baru untuk mengelola sumber daya alam dan budaya agar tetap terjaga, serta mengatasi tantangan seperti kerusakan lingkungan dan dampak sosial negatif akibat perkembangan pariwisata yang tidak terkendali.

Sejumlah penelitian terdahulu cenderung membahas pengembangan desa wisata dari sisi pelayanan, pendapatan, atau peran pemerintah secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah strategi pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi dengan pendekatan kolaboratif masih relatif terbatas. Padahal, destinasi seperti Kampung Blekok menuntut tata kelola yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika lingkungan dan relasi antar aktor. Dalam konteks ini, penelitian tentang *collaborative governance* menegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata membutuhkan keterlibatan lintas aktor yang terkoordinasi agar kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Akbar et al. (2022) yang menunjukkan pentingnya *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata, serta Dewi (2019) yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif bergantung pada hubungan antaraktor, proses interaksi, dan desain kelembagaan yang mendukung.

Namun demikian, dinamika perkembangan wisata Kampung Blekok menunjukkan adanya tantangan signifikan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam periode 2023–2025. Penurunan ini disebabkan oleh kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang dan abrasi yang terjadi pada Desember 2022 dan Februari 2025, sehingga menghambat akses menuju kawasan konservasi mangrove. Dalam hal ini pemerintah daerah dengan sigap melakukan perumusan renovasi dan inovasi baru dalam pengembangannya melalui kolaborasi antar sektor kepentingan yang terjalin saat ini (Pariwisata & Olahraga, 2022; Pariwisata & Olahraga, 2022).

Tabel 1.
Jumlah Wisatawan Kampung Blekok Tahun 2021-2025

Tahun	Percentage Target
2021	9.002 wisatawan
2022	11.000 wisatawan
2023	3.690 wisatawan
2024	860 wisatawan
2025	300 wisatawan

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tahun 2021 wisatawan meningkat sejak Kampung Blekok dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Akan tetapi, pada tahun 2023 jumlah wisatawan menurun. Pada tahun 2024, kampung blekok masih proses memprogramkan perbaikan prasarana menuju wisata konservasi mangrove. Hal ini disebabkan oleh kerusakan sarana menuju area konservasi mangrove yang diakibatkan oleh banjir bandang pada tanggal 30 Desember 2022 dan 04 Februari 2025, (Pariwisata & Olahraga 2022). Penurunan kunjungan wisatawan disebabkan oleh kerusakan sarana

dan prasarana menuju area konservasi mangrove akibat banjir bandang dan abrasi pada Desember 2022 dan Februari 2025.

Pemerintah daerah melakukan upaya renovasi dan inovasi melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Klatakan, serta sektor swasta melalui *Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam hal ini, POKDARWIS berperan sebagai pengelola operasional, sementara masyarakat lokal turut diberdayakan melalui kegiatan ekonomi seperti usaha kuliner dan kerajinan berbasis sumber daya lokal.

Secara metodologis, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola kolaborasi antar aktor, peran masing-masing pemangku kepentingan, serta strategi yang diterapkan dalam pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi secara mendalam terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis ekologi. Secara analitis, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada sinergi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media. Tantangan seperti kerusakan infrastruktur dan permasalahan lingkungan, termasuk akumulasi sampah, menunjukkan perlunya strategi pengelolaan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Destinasi Wisata Kampung Blekok di Desa Klatakan Kabupaten Situbondo, serta bagaimana kolaborasi antara aktor mendukung pengembangan destinasi tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Kampung Blekok, menjelaskan peran kolaborasi antar aktor dalam proses pengembangan destinasi, serta mengidentifikasi kendala dan peluang penguatan pengelolaan wisata berbasis konservasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual pada kajian strategi pemerintah daerah dan *collaborative governance*, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan destinasi wisata lokal berbasis konservasi.

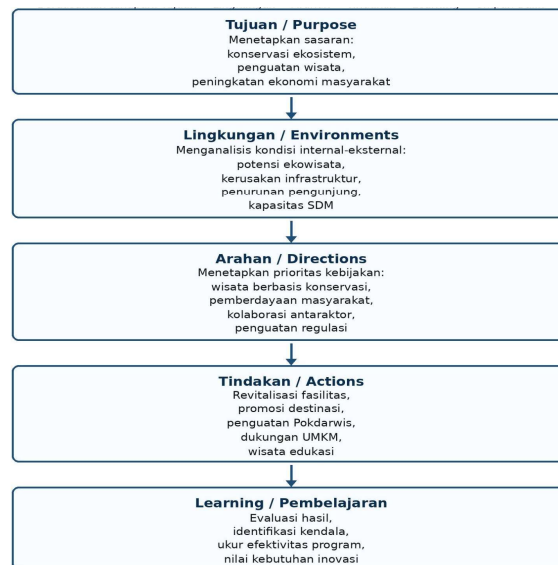
Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, penelitian mengenai Kampung Blekok dan pariwisata serupa umumnya berfokus pada aspek ekonomi, kualitas pelayanan, peran pemerintah, dan kolaborasi. Namun, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji strategi kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi wisata berbasis ekowisata secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* berbasis model *pentahelix* yang dipadukan dengan strategi pemerintahan menurut Mulgan. Dalam konteks pengembangan destinasi wisata, strategi tidak hanya dimaknai sebagai rencana formal, tetapi juga sebagai kemampuan pemerintah membaca masalah, menetapkan prioritas, mengkoordinasikan sumber daya, serta mengevaluasi hasil kebijakan. Pada pengembangan Kampung Blekok, strategi pemerintah daerah penting karena destinasi ini tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, melainkan juga sebagai kawasan konservasi mangrove dan habitat burung air yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *collaborative governance* untuk menjelaskan keterlibatan berbagai aktor dalam pengembangan destinasi wisata. Menurut Ansell dan Gash dalam Apriadi et al. (2023) *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di

luar pemerintahan, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat kebijakan publik). Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Dengan ini peneliti menggunakan aspek kuadran helix oleh Ansell and Gash bahwa *collaborative governance* terdiri dari 3 (tiga) pemangku kepentingan antara lain adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ansell dan Gash, (2008) dalam buku Brandsen (2021) menegaskan bahwa ada 4 (empat) indikator *collaborative governance* antara lain : *starting conditions* (kondisi awal), *institutional design* (desain institusional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dan *collaborative process* (proses kolaborasi) (Brandsen, 2021).

Menurut Glueck William F. dan Jauch Lawrence R (1996), strategi merupakan sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategi dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Menurut Geoff Mulgan (2009) strategi pemerintahan merupakan kerangka kerja yang dinamis untuk mengelola kekuasaan, sumber daya, dan inovasi demi kepentingan publik, serta menekankan bahwa pemerintah modern harus berubah dari model tradisional menjadi lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil Saifullah et al. (2025) Dalam strategi pemerintah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009:4-5) dalam penelitian Fajrianti et al. (2021) pelaksanaan Strategi dapat dilaksanakan dengan memfokuskan perhatian pada : *Purpose* (Tujuan) , *Environments* (Lingkungan), *Directions* (Arahan), *Actions* (Tindakan) dan *Learning* (Pembelajaran).



Gambar 1.
Flowchart

Sumber : Data diolah pada tahun 2026

Kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi publik tidak berhenti pada penyusunan program, tetapi bergantung pada kejelasan sasaran, kecermatan membaca konteks, ketepatan arah kebijakan, konsistensi implementasi, dan kemampuan melakukan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, kerangka ini relevan digunakan untuk

menganalisis bagaimana pemerintah daerah mengembangkan Kampung Blekok secara lebih sistematis.

Unsur pertama adalah tujuan (*purpose*), yaitu sasaran yang hendak dicapai pemerintah berdasarkan kesenjangan antara kondisi aktual dengan aspirasi masyarakat. Dalam kasus Kampung Blekok, tujuan strategis pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata, tetapi juga pada pelestarian ekosistem mangrove, perlindungan habitat burung air, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat. Unsur kedua adalah lingkungan (*environments*), yaitu analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan ekologis yang mempengaruhi pelaksanaan strategi. Pada Kampung Blekok, lingkungan strategis ditandai oleh potensi ekowisata yang kuat, tetapi sekaligus menghadapi tantangan berupa kerusakan infrastruktur, penurunan jumlah pengunjung, keterbatasan inovasi pengelolaan, dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan situasi lapangan.

Unsur ketiga adalah arahan (*directions*), yaitu penetapan orientasi kebijakan, prioritas, dan garis besar tindakan untuk mencapai tujuan. Unsur keempat adalah tindakan (*actions*), yakni implementasi nyata dari strategi dalam bentuk program, kegiatan, pengorganisasian, dan pemanfaatan sumber daya. Pada Kampung Blekok, tindakan strategis tercermin dalam pembangunan dan revitalisasi sarana wisata, penguatan promosi destinasi, pengembangan wisata edukasi, pemberdayaan kelompok sadar wisata, serta dukungan terhadap UMKM lokal. Unsur kelima adalah pembelajaran (*learning*), yaitu proses evaluasi terhadap keberhasilan maupun kelemahan strategi yang telah dijalankan. Pada konteks Kampung Blekok, pembelajaran menjadi penting karena pengembangan destinasi menghadapi dinamika nyata seperti kerusakan fasilitas, perlunya peningkatan kapasitas pengelola, serta kebutuhan inovasi promosi dan atraksi wisata.

Dalam pelaksanaan suatu regulasi tidak terlepas dari sebuah kebijakan untuk mengatur suatu program atau rencana. Kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris yaitu *public policy*. Kata *policy* diterjemahkan menjadi kebijakan oleh (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998). Menurut William Dunn (2018), model kebijakan publik mempermudah pengorganisasian informasi yang kompleks. Sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan. Kebijakan publik merupakan pola keputusan bersama yang saling terkait secara rumit, termasuk pilihan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah. Definisi ini menyoroti sifat dinamis dan melibatkan banyak bidang ilmu, sebagai upaya menangani masalah masyarakat (Angga, 2018). Model ini membantu pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam menganalisis proses kebijakan mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi sebuah kebijakan (Rochaeni, 2025). William N Dunn dalam proses kebijakan publik melibatkan lima tahap utama yang bersifat politis dan intelektual: Perumusan masalah atau mengidentifikasi kondisi yang memerlukan intervensi, Penyusunan agenda dan memprioritaskan isu untuk alokasi sumber daya, formulasi kebijakan, Implementasi kebijakan dan Evaluasi hasil serta kinerja

Pada konteks pengembangan wisata Kampung Blekok, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta berkontribusi melalui dukungan sumber daya dan kemitraan, akademisi memberi penguatan konseptual serta edukasi, masyarakat menjadi pelaku utama pengelolaan berbasis komunitas, sedangkan media berfungsi memperluas promosi dan citra destinasi. Karena itu, strategi pemerintah daerah akan lebih efektif apabila lima unsur strategi menurut Mulgan dijalankan melalui kolaborasi multipihak. Dengan demikian, kerangka strategi pemerintah dan *collaborative governance* saling melengkapi: yang satu menjelaskan tahapan pelaksanaan strategi, sedangkan yang lain menjelaskan mekanisme kerja antaraktor dalam mencapai tujuan pengembangan destinasi secara berkelanjutan

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Destinasi Wisata Kampung Blekok di Desa Klatakan, Kabupaten Situbondo, termasuk pola kolaborasi antaraktor yang terlibat. Lokasi penelitian meliputi Destinasi Wisata Kampung Blekok, Kantor Desa Klatakan, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, serta pihak swasta dan kelembagaan lokal yang terlibat dalam pengembangan destinasi. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga dan aktor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan perumusan kebijakan, pengelolaan wisata, konservasi lingkungan, promosi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Kampung Blekok.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan kriteria memiliki pengalaman, jabatan, keterlibatan langsung, dan kemampuan memberikan informasi akurat mengenai pengembangan wisata Kampung Blekok. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yang terdiri atas 5 informan utama dan 3 informan pendukung. Informan utama meliputi: pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dengan karakteristik sebagai perumus program dan promosi pengembangan pariwisata; pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang berkarakter sebagai leading sector, aktor teknis konservasi, pemeliharaan lingkungan, dan dukungan sarana; Kepala Desa Klatakan dengan karakteristik sebagai pengambil kebijakan di tingkat desa dan fasilitator pemberdayaan masyarakat; Ketua Pengelola Wisata Kampung Blekok yang berkarakter mengetahui pengelolaan operasional destinasi secara langsung; Ketua POKDARWIS yang berkarakter sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam pelayanan dan pengembangan wisata. Adapun informan pendukung terdiri atas; pihak CSR PT POMI dengan karakteristik sebagai mitra swasta pendukung infrastruktur dan kegiatan pengembangan; unsur BUMDes dengan karakteristik sebagai lembaga ekonomi desa yang mendukung pengelolaan dan pemberdayaan usaha lokal; serta ; perwakilan akademisi/MAHASPALA dengan karakteristik sebagai mitra edukasi, promosi, dan kegiatan konservasi lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi (Moleong, 2011). Observasi digunakan untuk melihat kondisi fisik destinasi, aktivitas wisata, fasilitas, dan aspek konservasi; wawancara semi-terstruktur dilakukan agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel sesuai pengalaman masing-masing informan; sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, foto, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Destinasi Wisata Kampung Blekok.

Hasil

Strategi kolaboratif antar berbagai sektor memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan keselarasan dalam tujuan, lingkungan kerja, arah kebijakan, tindakan, serta proses pembelajaran di antara para pemangku kepentingan agar kolaborasi dapat berjalan secara efektif. Melalui kerja sama yang terstruktur dan terarah, pengelolaan serta pengembangan destinasi wisata tidak hanya mampu meningkatkan kualitas daya tarik wisata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek kunci dalam keberhasilan tersebut, terutama

dalam pengembangan usaha berbasis lokal seperti kerajinan, kuliner, dan layanan pariwisata. Di sisi lain, wisatawan juga berperan aktif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, khususnya melalui partisipasi dalam kegiatan konservasi mangrove.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata Kampung Blekok di Desa Klatakan, Kabupaten Situbondo, ditemukan sejumlah temuan signifikan yang berkaitan dengan indikator penelitian. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah meliputi peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas wisata, penguatan promosi dan pemasaran destinasi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, pemerintah juga melakukan fungsi pengawasan sebagai upaya evaluasi terhadap implementasi strategi yang telah dijalankan, guna mendorong terciptanya inovasi dalam pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi prioritas utama dalam mendukung kemudahan wisatawan untuk mengakses kawasan Kampung Blekok, terutama pasca terjadinya kerusakan akibat bencana alam. Upaya ini mencakup perbaikan sarana transportasi, fasilitas penunjang wisata, serta penyediaan layanan dasar yang memadai. Sementara itu, strategi promosi dan pemasaran dilakukan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, guna memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan daya tarik destinasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor krusial dalam menunjang keberhasilan pengelolaan destinasi wisata. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelola wisata dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan lingkungan. Dengan adanya SDM yang kompeten, diharapkan pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keberhasilan strategi kolaboratif ini sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Sinergi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak lainnya memungkinkan terciptanya inovasi serta solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kerusakan lingkungan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan komitmen bersama menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok.

Melalui kerja sama yang terarah dan tertata, pengelolaan serta pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan. Kolaborasi ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aspek pengelolaan wisata, seperti pengembangan kerajinan lokal, usaha kuliner, dan penyediaan layanan pariwisata. Selain itu, wisatawan juga dapat berpartisipasi dalam mendukung keberlanjutan destinasi, salah satunya melalui keterlibatan dalam upaya pelestarian dan konservasi tanaman mangrove yang menjadi ciri khas kawasan wisata Kampung Blekok.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata Kampung Blekok di Desa Klatakan, Kabupaten Situbondo, ditemukan beberapa hasil signifikan yang berkaitan dengan indikator penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Kampung Blekok diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan habitat burung air, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan destinasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk menjaga karakter Kampung Blekok sebagai destinasi wisata berbasis konservasi. Tujuan ganda ini penting karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak semata-

mata mengejar pertumbuhan pariwisata, melainkan berupaya menyeimbangkan kepentingan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan.

Penguatan Kebijakan dan Regulasi Wisata

Penguatan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan ialah langkah atau cara mencapai tujuan, dengan strategi, kebij akan, undang-undang, dan program yang terperinci, serta kepemimpinan yang menginspirasi untuk meyakinkan orang lain agar mendukung tujuan tersebut. Penguatan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan ialah langkah atau cara mencapai tujuan, dengan strategi, kebijakan, undang-undang, dan program yang terperinci, serta kepemimpinan yang menginspirasi untuk meyakinkan orang lain agar mendukung tujuan tersebut. Penguatan kebijakan dan regulasi wisata mengacu pada UU nomor 18 tahun 2025. Sebagai penguat suatu keberlanjutan wisata. Undang-undang telah mencakup rencana induk pembangunan, pengelola desa wisata, pariwisata sehat, tata kelola destinasi wisata, dan badan layanan umum daerah (BLUD). Upaya penguatan regulasi wisata dilaksanakan untuk memastikan pembangunan dan pengembangan wisata sesuai dengan rencana strategis dan melibatkan masyarakat lokal.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wisata Kampung Blekok tetap berpaku pada Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2017 tentang pemeliharaan konservasi dan keaneka ragaman hayati. Karena wisata ini merupakan binanaan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu area konservasi. Dalam peraturan bupati meliputi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan. Yang mana keberlangsungan wisata ini tetap menegdepankan perlindungan alam dan habitat alami yang ada.



Gambar 2.
Dokumen PERBUP No. 13 Tahun 2017
Sumber : Data diolah tahun 2026

Penguatan kebijakan dan regulasi wisata mengacu pada PERBUP nomor 13 tahun 2017. Sebagai penguat suatu keberlanjutan wisata yang tetap mengutamakan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan konservasi. Sedangkan undang-undang telah mencakup rencana induk pembangunan, pengelolaan desa wisata, pariwisata sehat, tatakelola dstinasi wisata, dan badan layanan umum daerah (BLUD). Upaya penguatan regulasi wisata dilaksanakan untuk mmemastikan pembangunan dan pengembangan wisata sesuai dengan rencana strategis dan melibatkan masyarakat lokal. Akan tetapi tetap memperhatikan keragaman hayati dengan ademi menjaga wilayah konservasi. Sehingga

keberlangsungan wisata dan pelestarian lingkungan berjalan beriringan dan sama-sama berkembang dan terjaga.

Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata

Penyediaan infrastruktur menjadi pondasi perkembangan destinasi wisata Kampung Blekok. Infrastruktur destinasi wisata Kampung Blekok disediakan secara kerjasama, beberapa penyediaan infrastruktur yang ada berupa ruang simaksi/ registrasi, parkir luas, kamar mandi dan sanitasi, ruang edukasi, taman, *booth* UMKM, menara, jembatan menuju konservasi, dan transportasi air berupa sampan. Sarana prasarana yang lengkap menjadi landasan daya tarik wisatawan, selain itu, dengan adanya peningkatan fasilitas menciptakan ruang publik, pengembangan sosial masyarakat, dan titik kumpul wisata yang terakomodasi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khalid Maulana selaku ketua pengelola menyatakan bahwa :

Dalam pembangunan infrastruktur bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Desa Klatakan, dan PT POMI. Seksi pariwisata dan Kasi Pemeliharaan Lingkungan Dan Hutan menegaskan bahwa dalam mengembangkan destinasi wisata Kampung Blekok, strategi yang dilakukan yakni mulai dari penyediaan infrastruktur, mengikuti setiap event-event wisata, branding dan pemasaran melalui IG, Facebook, Youtube dan tiktok, penguatan kelembagaan, kerjasama dan ikut serta dalam program *wonderfull indonesia* dan event pariwisata regional, Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kerap kali mengadakan festival di area wisata untuk menarik wisatawan, pengembangannya melalui pemeliharaan konservasi mangrove.

Dengan ini kolaborasi multi pihak telah melakukan perumusan dan pembaruan fasilitas wisata dalam pengembangannya untuk daya tarik wisatawan. *Collaborative* multi pihak/*collaborative governance* destinasi wisata sering kali melakukan inovasi dalam peningkatan suatu wisata yang berkelanjutan investasi yang pas dalam sarana dan prasarana wisata jadi fondasi utama untuk membuka peluang pariwisata yang berkelanjutan. Fasilitas transportasi yang lancar, seperti jalan raya bagus dan angkutan umum yang cukup, memudahkan wisatawan sampai ke destinasi dengan lebih mudah dan nyaman. Ketersediaan akomodasi berkualitas juga bisa meningkatkan jumlah kunjungan serta mendorong wisatawan tinggal lebih lama untuk menikmati segala penawaran destinasi tersebut. Selain untung secara ekonomi, sarana prasarana yang lengkap dan modern turut mendukung kemajuan sosial masyarakat sekitar. Penyediaan fasilitas rekreasi seperti taman, pantai, atau area wisata lainnya menciptakan ruang publik yang nyaman dan menarik bagi warga lokal maupun wisatawan untuk berkumpul, berinteraksi, dan beraktivitas bersama. Tak ketinggalan, fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan wisatawan saat berlibur..

Kolaborasi Multi Pihak (*Pentahelix*)

Pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok tidak terlepas dari beberapa sektor pemerintah sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan otonom di tingkat daerah. Masing-masing aktor memiliki peran untuk meningkatkan kualitas wisata. Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor dalam pengembangan wisata, pengawasan pengelolaan wisata yang berfokus pada konservasi hutan mangrove dan habitat burung air melalui Peraturan Bupati Situbondo No. 13 tahun 2017, Dinas Pariwisata bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan meningkatkan kunjungan wisatawan atau promosi wisata, baik melalui media maupun mengikuti event wisata nasional dan internasional. Dan Pemerintah Desa Klatakan sendiri sebagai PIC atau pelaksana teknis dengan pemanfaatan BUMdesa dan membentuk tim pelaksana operasional wisata melalui Kelompok Sadar Wisata. Serta menerapkan regulasi melalui Peraturan Desa untuk pengembangan desa wisata. Serta pihak keterlibatan PT POMI dapat membantu dalam pengembangan yang

berkelanjutan. Dengan adanya bantuan berupa CSR, perlindungan konservasi lingkungan pesisir, peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi masyarakat melalui CSR jangka Panjang.

Dengan kolaborasi multi pihak juga mampu mengembangkan destinasi wisata, dikarenakan dengan adanya kolaborasi dapat dijadikan sasaran strategi pengembangan wisata yang berkelanjutan. Model kolaborasi ini meliputi Pemerintahan, Swasta, Akademisi, Komunitas, dan Media. Keterlibatan pemerintahan dalam pengembangan destinasi wisata saling menguatkan berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah. Dengan potensi yang ada memunculkan peluang wisata berkembang dengan baik. Pemerintah daerah memiliki strategi dalam keberlanjutan wisata Kampung Blekok tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan eksistensi wisata yang berkelanjutan

Tabel 2.
Bentuk Dukungan Pihak Swasta

No	Bentuk Dukungan Swasta	Tahun
1	Pembangunan Center Area Edukasi	2021
2	Penanaman Bibit Mangrove Berkelanjutan	2017, 2019, 2022
3	Pelatihan <i>Capacity Building</i>	2023
4	Revitalisasi Fasilitas Wisata	20017-2025
5	Program Konservasi Burung Blekok dan Habitat Mangrove	2018-2025

Sumber : Data diolah tahun 2026

Dalam setiap pelaksanaannya keterlibatan akademisi juga menjadi kunci suatu kegiatan wisata. Akademisi menjadi mitra pengembangan dan pengetahuan di tingkat akademik. Hal itu mampu menarik minat pembelajaran melalui wisata. Mahasiswa Pecinta Alam (MAHASPALA) Universitas PGRI Situbondo juga sering melakukan kegiatan untuk membantu pengembangan wisata.



Gambar 3.
Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove

Sumber: Data diolah tahun 2026

Keterlibatan akademisi dalam pengembangan wisata dengan mahasiswa dan masyarakat setempat. Dalam pengembangannya kerap kali melaksanakan pelatihan dan edukasi dari kampus untuk pemeliharaan wisata dan peningkatan UMKM, serta edukasi bagi mahasiswa maupun siswa melalui penanaman mangrove, festival mahasiswa, dan promosi melalui instagram mengenai kegiatan kegiatan untuk menarik wisatawan. Multi pihak saling bekerjasama untuk strategi pengembangan destinasi wisata Kampung

Blekok. Dengan kolaborasi tersebut mampu meningkatkan keberlangsungan suatu wisata. Sehingga dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan sinergitas destinasi wisata semakin berkembang.

Participacy dalam pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis masyarakat (*based tourism*) mencakup hal dalam keberlangsungan wisata yang berkelanjutan dan berkelas ditingkat nasional maupun internasional. Masyarakat yang bergabung dalam komunitas menjadi hal penting dalam pengelolaan maupun pengembangan destinasi wisata. Pengelolaan destinasi wisata Kampung Blekok bersifat *Community Based Tourism* (CBT), dengan melibatkan masyarakat lokal yang berperan aktif sebagai subjek bukan objek. Masyarakat sebagai perencana, pengelola, penerima manfaat, dari kegiatan wisata. untuk memastikan pariwisata berkelanjutan dan tidak merusak kearifan lokal maupun lingkungan. Hal ini ditegaskan oleh KABID Pemeliharaan lingkungan Ibu Rante Seta yang menyatakan bahwa sebagian dari regulasi untuk meningkatkan kualitas SDM, dan benar bahwa melibatkan komunitas atau masyarakat, dan juga akademisi untuk destinasi wisata karena butuh kolaborasi.

Keterlibatan komunitas dalam pengelolaan maupun pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok dapat menjaga keserasihan antara budaya dan kebaruan wisata, selain itu dapat meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pemasaran UMKM. Berdasarkan data Desa Klatakan bahwa 80% masyarakat Kampung Blekok adalah pengrajin. Sehingga dengan adanya wisata dapat menambah daya jual UMKM masyarakat setempat.

Tidak luput media sebagai alat bantu dalam promosi wisata berkelanjutan. Dengan pemanfaatan media secara optimal dapat membantu keberlangsungan wisata jangka panjang dan menarik wisatawan dengan jangkauan luas untuk berkunjung. Penggunaan media dalam promosi mampu meningkatkan daya tarik wisatawan, ketertarikan pengunjung paling banyak mengetahui melalui media sosial. Dikarenakan ketertarikan lebih pada wisata. Dengan ini media menjadi sarana yang efektif untuk pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok. Penggunaan media yang strategis mampu mempertahankan keberlangsungan dalam menarik wisatawan tertarik pada wisata. Berdasarkan data bahwa media menjadi salah satu kunci eksistensi wisata di era global, karena sosial media sangat berpengaruh pada pembangun brand awareness untuk menarik wisatawan.

Promosi dan Pemasaran Wisata

Promosi adalah kegiatan pemasaran dan penawaran suatu produk atau layanan kepada wisatawan. Promosi dapat dilakukan secara terus-menerus melalui media yang efektif, baik cetak poster maupun digital yang tergantung target pemasarannya. Kelemahan promosi dapat menghambat keberlangsungan destinasi wisata, yang dapat berakibat pada rendahnya minat pengunjung wisata. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, dapat mempermudah akses wisatawan tentang destinasi wisata, mulai dari lokasi, kondisi saat ini, dan fasilitas yang tersedia, menjadi lebih muda.

Promosi destinasi wisata Kampung Blekok telah dilakukan melalui berbagai strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, promosi dilakukan dengan mengikuti event tingkat nasional dan provinsi serta menyelenggarakan festival atau kegiatan lokal yang bertujuan untuk memperkenalkan daya tarik wisata kepada masyarakat luas. Sementara itu, secara tidak langsung, promosi dilakukan melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, serta melalui penyebaran brosur. Berbagai bentuk promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperkuat citra Kampung Blekok sebagai destinasi wisata unggulan.



Gambar 4.

Penghargaan Event Nasional ADWI

Sumber : Laporan Instansi Dinas Pariwisata

Keterlibatan akademisi menjadi strategi pengembangan melalui promosi dan pemasaran, keuntungan bersama, dan upaya Dinas Pariwisata telah dilaksanakan sesuai regulasi dan standar wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa Dinas Pariwisata telah berupaya melakukan pengembangan wisata melalui promosi untuk mempermudah akses wisatawan tentang Kampung Blekok. Gambar diatas menunjukkan bahwa hasil promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata menjadi bukti kuat bahwa keberhasilan pengembangan bertahap menjadi kunci daya tarik wisata.

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pengembangan maupun pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu kunci perkembangan suatu wisata, yang mana dengan adanya pelatihan, webinar atau cara lain dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola destinasi wisata Kampung Blekok tersebut. Dalam hal ini Kantor desa ikut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya pengelola wisata Kampung Blekok. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan PT POMI PLTU kerap kali dilakukan di tempat area wisata.

Strategi *collaborative* berbagai sektor sangat penting dalam pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok yang berkelanjutan. Dikarenakan dalam pengembangan wisata perlu ada kesepahaman tujuan, lingkungan kerja, arahan, tindakan, dan pembelajaran agar kolaborasi bisa berjalan efektif. Melalui kerja sama yang terarah dan tertata, pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat menarik wisatawan. Hal ini terjadi karena kerja sama membuat masyarakat ikut terlibat aktif dalam berbagai aspek pengelolaan wisata, seperti pengembangan kerajinan lokal, usaha kuliner, dan layanan pariwisata. Begitu juga dengan wisatawan yang ikut serta dalam pelestarian konservasi tanaman mangrove.

Pengembangan wisata Kampung Blekok masih belum bisa dikatakan standarisasi, dikarenakan atraksi dari wisata dan kegiatan yang dilakukan belum cukup mampu untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Keterbatasan pengelola destinasi wisata Kampung Blekok menjadi sasaran utama untuk keberlanjutan wisata terus berkembang dan menjadi wisata unggulan daerah dengan melestarikan lingkungan dan habitat yang ada. Oleh karena itu, pengembangan wisata Kampung Blekok memerlukan peningkatan standarisasi atraksi da kegiatan atau suatu kebaruan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai kunci utama. Dengan demikian, keterlibatan aktif komunitas masyarakat

maupun pengelola dalam pelatihan dan inovasi mampu meningkatkan kualitas wisata berkelanjutan.

Pengembangan Wisata Berkelanjutan

Pengembangan wisata berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan pariwisata tetap relevan dan keberlangsungan wisata. Serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi sasaran utama untuk keberlanjutan wisata lebih fokus dan efektif. Supaya muncul ide kreatif untuk kembangkan wisata Kampung Blekok jadi destinasi wisata jangka panjang, akan tetapi tetap mengedepankan perlindungan ekosistem konservasi di sekitarnya. Walaupun revitalisasi sudah jalan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada masih harus dilatih kemampuan inovatif seperti pemasaran produk wisata ramah lingkungan, promosi digital, dan variasi atraksi supaya destinasi ini lebih tangguh bersaing dan mandiri secara ekonomi.

Pengembangan wisata Kampung Blekok masih belum bisa dikatakan standarisasi, dikarenakan atraksi daripada wisata dan kegiatan yang dilakukan belum cukup mampu untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Keterbatasan masyarakat pengelola destinasi wisata Kampung Blekok menjadi sasaran utama untuk keberlanjutan wisata terus berkembang dan menjadi wisata unggulan daerah dengan melestarikan lingkungan dan habitat yang ada. Dengan adanya evaluasi dan inovasi bagi pihak pengelola mampu meningkatkan pemahaman dan inovasi baru dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Dalam evaluasi wisata berkelanjutan perlu adanya penilaian dari pengalaman wisatawan dan ikut serta sebagai wisatawan. Hal ini menjadi point penting untuk mengetahui dimana letak ketidak sesuaian standarisasi wisata. Pengembangan wisata Kampung Blekok masi belum bisa dikatakan standarisasi, dikarenakan atraksi daripada wisata dan kegiatan yang dilakukan belum cukup mampu untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Keterbatasan masyarakat pengelola destinasi wisata Kampung Blekok menjadi sasaran utama untuk keberlanjutan wisata terus berkembang dan menjadi wisata unggulan daerah dengan melestarikan lingkungan dan habitat yang ada.

Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antar berbagai pihak jadi kunci utama dalam membentuk strategi mengembangkan destinasi wisata Kampung Blekok secara berkelanjutan. Kerja sama ini terlihat dari keterlibatan aktif pemerintah daerah, dinas terkait, pemerintah desa, swasta seperti PT POMI, akademisi, dan masyarakat lokal yang bersama-sama menyusun serta menjalankan program pengembangan wisata. Dengan kolaborasi yang terarah, pengelolaan destinasi tidak hanya menentukan tujuan strategi wisata, melainkan juga mengejar peningkatan jumlah wisatawan, menjaga lingkungan, khususnya ekosistem mangrove dan burung air sebagai ikon wisata. Strategi multi pihak dalam pengembangan ini membangun kesepahaman tujuan, pembagian tugas, serta pembelajaran bersama, sehingga masyarakat bisa ikut langsung mengelola wisata, mengembangkan kerajinan lokal, usaha kuliner, layanan pariwisata, dan kegiatan konservasi mangrove yang melibatkan wisatawan untuk edukasi lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar et al. (2022) yang menunjukkan bahwa *collaborative governance* berperan penting dalam pengembangan desa wisata, serta Dewi (2019) yang menegaskan bahwa kolaborasi antar aktor menjadi unsur penting dalam kebijakan publik.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Implementasi fokus pada tiga hal utama yaitu: perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas, penguatan promosi serta pemasaran, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Infrastruktur ditingkatkan lewat penyediaan serta perbaikan fasilitas seperti jembatan menuju area konservasi, ruang registrasi, parkir,

kamar mandi, ruang edukasi, taman, booth UMKM, menara area konservasi, dan sampan transportasi air. Semua dibangun melalui kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan CSR PT POMI. Dalam promosi maupun pemasaran wisata, Dinas Pariwisata bersama Dinas Lingkungan Hidup, PT POMI, dan akademisi sering kali mengikuti event nasional serta regional, gelar festival, serta gunakan media sosial dan brosur guna tingkatkan citra Kampung Blekok. Sehingga eksistensi dan tetap mengedepankan konservasi dan habitat area konservasi terjaga. Pengembangan Sumber Daya manusia dilakukan via pelatihan, pendamping BUMDes, pembentukan POKDARWIS, area edukasi konservasi, dan pelatihan UMKM, sehingga kemampuan masyarakat lokal sebagai pelaku wisata semakin efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwijayanty et al. (2021) yang menjelaskan bahwa pengelolaan sektor pariwisata oleh pemerintah daerah sangat ditentukan oleh penguatan promosi, pengelolaan fasilitas, dan peran kelembagaan pariwisata.

Arah kebijakan yang strategis dalam tujuan yang ditetapkan menjadi unsur penting dalam menjalankan destinasi wisata, berpaku pada pembangunan wisata yaitu UU nomor 18 tahun 2026 tentang kepariwisataan dan PERBUP nomor 13 tahun 2017 menjadi acuan pelaksanaan wisata yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan kebijakan wisata dan konservasi telah membuktikan bahwa keberlanjutan wisata dan pelestarian lingkungan berjalan beriringan. Meski ada hambatan dan tantangan dalam pengelolaannya, Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi keberlanjutan wisata Kampung Blekok yang strategis. Destinasi wisata Kampung Blekok menunjukkan bahwa kondisi awal dengan kaitan PERBUP bahwa menjaga kelestarian konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan perekonomian masyarakat, dan wisata menarik dengan suguhan wisata alam konservasi dan budaya. Namun dalam keberlanjutan wisata mengalami penurunan daya tarik wisatawan yang diakibatkan oleh kerusakan infrastruktur wisata konservasi dan belum adanya inovasi baru tentang revitalisasi destinasi wisata Kampung Blekok. Sehingga penurunan angka wisatawan menurun hingga saat ini.

Implementasi sebuah rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan membuktikan bahwa strategi pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok pada tahun 2021 telah sukses memenangkan penghargaan Anugerah Destinasi Wisata Indonesia (ADWI) dengan tema kelestarian hutan mangrove dan habitat burung air. Meskipun ada tantangan dalam mengembangkan destinasi wisata yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya revitalisasi dan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menentukan arah wisata yang berkelanjutan atau inovasi wisata dan menetapkan wisata sebagai bisnis, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata telah melakukan revitalisasi dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kebijakan perlu diikuti dengan penguatan kapasitas pelaksana dan strategi keberlanjutan agar daya saing destinasi tetap terjaga Agung (2025).

Strategi pengembangan wisata telah menjadi dukungan yang sesuai dengan kolaborasi multi pihak dalam memajukan wisata yang berkelanjutan. Strategi mencerminkan sebagai pengawal, pengawasan SDM, Penerapan dan pemeliharaan desa wisata, guna untuk terciptanya desa wisata yang memiliki daya saing kuat di tingkat nasional maupun internasional. Hasil yang diperoleh dari beberapa informan dalam pengembangan destinasi wisata, Mahasiswa Pecinta Alam (MAHASPALA) Universitas PGRI Situbondo juga sering melakukan kegiatan dan edukasi bagi mahasiswa maupun siswa melalui penanaman mangrove, festival mahasiswa, dan promosi melalui instagram mengenai kegiatan kegiatan untuk menarik wisatawan. pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok belum bekerjasama dengan media partner/stasiun televisi maupun siaran radio. Namun, hanya memfokuskan pada ajang kompetisi atau ikut serta event-event pariwisata, promosi media yang dilakukan melalui website pariwisata, Instagram, Tiktok, Youtube, dan facebook. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa penyediaan infrastruktur,

promosi wisata, dan pemberdayaan Sumber Daya menjadi alasan utama untuk meningkatkan kembali daya tarik wisatawan. Temuan ini sejalan dengan Akbar et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antaraktor, serta Dwijayanty et al. (2021) yang menekankan pentingnya promosi dan penguatan pengelolaan sektor pariwisata oleh pemerintah daerah.

Evaluasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan strategi. Evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok sadar wisata dan pemerintah daerah dengan memikirkan atau menetapkan kembali kebaruan revitalisasi destinasi wisata Kampung Blekok untuk memfokuskan pada konservasi dengan tujuan menjaga habitat burung air, dengan mengedepankan pelestarian hayati yang menjadi tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Perumusan Surat Keputusan (SK) daripada pengelola dan kebaruan atraksi daya tarik wisatawan yang harus diperhatikan. Serta amanitas dan nyaman daripada wisatawan akan ditingkatkan. Dengan adanya komponen tersebut telah sesuai dengan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan wisata yang berkelanjutan. Temuan keseluruhan ini membuktikan bahwa strategi pemerintah daerah berbasis kolaborasi multi pihak sudah selaras dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, walaupun masih ada peluang perbaikan seperti perluas kerja sama dengan media massa dan inovasi promosi yang lebih.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Destinasi Wisata Kampung Blekok dilakukan melalui tiga orientasi utama, yaitu perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas, penguatan promosi destinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Strategi tersebut dijalankan melalui pola kolaborasi multi aktor yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat, pihak swasta, akademisi, dan media. Dalam praktiknya, kolaborasi tersebut telah mendukung pengembangan destinasi, terutama pada aspek konservasi, penyediaan fasilitas, edukasi lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, efektivitas strategi masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kerusakan infrastruktur, keterbatasan inovasi destinasi, belum optimalnya kapasitas SDM, dan belum kuatnya kemitraan promosi dengan media

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi dapat dipahami secara lebih utuh melalui kombinasi perspektif strategi pemerintahan dan *collaborative governance*. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi tidak cukup ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar aktor, konsistensi implementasi, dan kemampuan pembelajaran kebijakan. Adapun secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem evaluasi, revitalisasi fasilitas wisata, pengembangan inovasi atraksi, peningkatan kapasitas pengelola, serta perluasan kerjasama promosi dengan media dan mitra strategis lainnya agar Kampung Blekok dapat berkembang secara lebih berkelanjutan. Namun, pada saat penelitian ini dilaksanakan terdapat beberapa keterbatasan yang dialami, diantaranya ialah keterbatasan waktu wawancara dengan pihak PT POMI PLTU dan jarak tempuh yang cukup jauh dari lokasi penelitian, serta sulitnya mendapatkan informasi dari pihak pengelola. Sehingga informasi yang didapatkan mengenai pengembangan destinasi wisata Kampung Blekok sedikit kurang efektif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penelitian, dan terima kasih kepada para dosen pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu memberikan masukan

dan kritikan dalam penyempurnaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh informan penelitian yang telah mendukung dalam pemberian data penelitian, sehingga penelitian ini terselesaikan.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak ada konflik kepentingan.

Referensi

- Agung, M. F. M. (2025). Strategi collaborative governance dalam reformasi pelayanan publik. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 11(2), 196–210.
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170–177. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>
- Ananto, O. (2018). Persepsi pengunjung pada objek wisata danau buatan Kota Pekanbaru (Skripsi, Universitas Riau). <https://repository.unri.ac.id>
- Angga, S. (2018). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.
- Anshar, M. (2024). *Digital governance* (A. F. Arsal, Ed.). Kencana.
- Apriadi, Y., Wanto, A. H., & Novita, A. A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal collaborative governance dalam pemetaan wilayah adat di Kabupaten Sorong Selatan. *JAP*, 6(7), 360–367.
- Asmara, J. C., & Ermansyah, E. (2016). Urgensi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi desa. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.35967/jipn.v13i1.3216>
- Asriandy, I. A. N. (2016). *Strategi pengembangan obyek wisata air terjun Bissappu di Kabupaten Bantaeng* (Skripsi, Universitas Hasanuddin). <https://core.ac.uk/download/pdf/>
- Bado, B. (2022). *Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode kualitatif ilmiah*. Tahta Media Group.
- Brandsen, T. (2021). Collaborative governance. In *Encyclopedia*.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200–210. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dwijayanty, O., Rachman, I., & Pangemanan, F. N. (2021). Peran dinas pariwisata daerah dalam mengelola sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10.
- Fajrianti, D., Dedi, A., & Yuliani, D. (2021). Strategi pemerintah desa dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu. *Unigal Repository*. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1068>
- Iqbal, M. (2023). Kampung Blekok Situbondo, surga mangrove dan ribuan burung blekok. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/wisata/447846/kampung-blekok-situbondo-surga-mangrove-dan-ribuan-burung-blekok>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative governance: Konsep dan aplikasi*. CV Budi Utama.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, S. (2012). *Strategi pemerintahan manajemen organisasi publik*. Erlangga.
- Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Situbondo. (2022). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)*.
- Pranoto, P. (2023). *Pengembangan pariwisata berbasis model kolaborasi pentahelix* (M. Martini, Ed.). CV Media Sains Indonesia.

- Puspaningtyas, A. (2022). *Collaborative governance: Sebuah paradigma*. <https://publik.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/collaborative-governance-sebuah-paradigma.html>
- Qomar, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Intelegensia Media.
- Rochaeni, A. (2025). *Kebijakan sektor publik*. Mangu Makmur Tanjung Lestari.
- Saifullah, S., & Askandar, A. (2025). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi. *Justness: Jurnal Hukum, Politik dan Agama*. <https://doi.org/10.61974/justness.v5i1.80>
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen strategik*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.